

MEMPERKOKOH IDIOLOGI NEGARA PANCASILA MELALUI BELA NEGARA

Budiyono
Universitas PGRI Madiun
email: budiyono@unipma.ac.id

Naskah diterima: 12/04/2017 revisi: 27/04/2017 disetujui: 27/04/2017

Abstrak

Semenjak reformasi pembicaraan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara semakin redup. Sementara berbagai idiologi transnasional bermunculan mewarnai gerakan-gerakan sosial bernuansa agama yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kelompok-kelompok masyarakat, yang dampaknya kerap menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Indonesia seolah berjalan tanpa arah yang jelas terombang ambing karena tanpa pijakan yang kokoh. Bila ada peristiwa konflik dan kekerasan yang banyak menyedot perhatian publik, kita baru teringat Pancasila sebagai idiologi negara dipanggil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa dan kenegaraan yang terjadi. Bedasar hal tersebut artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi solusi alternatif dalam upaya memantapkan keyakinan Pancasila sebagai idiologi negara melalui bela negara. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Untuk memperkokoh idiologi negara pancasila kita harus kembali meyakini bahwa Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan telah terbukti berhasil melalui berbagai ujian yang akan menggantikannya serta dapat mempersatukan bangsa harus semakin diperkokoh, dimantapkan dalam sanubari bangsa Indonesia guna menangkal idiologi-idiologi asing bernuansa agama (radikal) yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia melalui bela negara. Dengan bela negara yang dilakukan secara berkesinambungan, semakin memperkuat kebangsaan dan pertahanan Indonesia.

Kata kunci: Idiologi Pancasila, Bela Negara

STRENGTHENING THE IDEOLOGY OF PANCASILA THROUGH MARTIAL

Abstract

Since the reform talk of Pancasila as the state ideology of nation and increasingly dim. While various ideological coloring emerging transnational social movements, religious nuances that affect the thinking and action of community groups, whose impact often lead to conflict and violence in society. Indonesia seemed to walk without a clear direction tottering because without a solid footing. When there are conflicts and violent events that a lot of public attention, we just remembered Pancasila as the state ideology called upon to solve the problems of the nation and state, occurs. Bedasar tersebut This article aims to contribute alternative solutions in an effort to strengthen the conviction of Pancasila as the state ideology through the defense of the country. The study was conducted using qualitative methodologies with the normative approach and the study of literature originating from legislation, books, and scientific journal articles. To strengthen the ideology of the state Pancasila we have to go back to believe that Pancasila excavated from the noble values of the nation and has been proven to work through a variety of tests that would replace it and can unite the nation must be increasingly strengthened, stabilized in the heart of Indonesia to counter the ideology-ideology alien religious nuances (radicals) that are not in the spirit of the Indonesian people through defending the country. By defending the country on an ongoing basis, further strengthening national defense and Indonesia.

Keywords: ideology Pancasila, the State Defense.

PENDAHULUAN

Euforia politik di era reformasi membawa kebebasan dan keterbukaan warga negara yang tergabung dalam ormas (organisasi kemasyarakatan) untuk mengekspresikan ide dan gagasan baru sebagai spirit gerakan organisasi-organisasi kemasyarakatan memperjuangkan tujuan yang hendak dicapainya dalam Negara Republik Indonesia. Ide dan gagasan itu kerap muncul dalam bentuk ideologi-ideologi atau paham berasal dari luar negeri atau ideologi transnasional yang nilai-nilai dan prinsipnya sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Multi ideologi itu seperti negara agama, negara sekuler, negara sosio demokrasi, paham radikalisme, imperialisme, liberalisme, kapitalisme, fundamentalisme, komunisme, kekhalifahan dan dalam hal tertentu juga paham ateisme.

Meruaknya ideologi-ideologi baru atau paham-paham tersebut yang membonceng arus globalisasi menjadi ancaman yang serius dan membahayakan ideologi negara Indonesia Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama oleh founding fathers pada waktu mendirikan Republik Indonesia sebagai dasar dan tuntutan bernegara lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan kejayaan bangsa dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, telah terbukti dapat menyatukan bangsa Indonesia.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini kemampuan Pancasila sebagai bintang pimpinan (Leitstar) “ kecuali Pancasila adalah satu weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin semakin yakinnya bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke hanyalah dapat bersatu padu atas dasar Pancasila itu, bukan saja alat

mempersatu untuk diatasnya kita letakkan negara Republik Indonesia, melainkan juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara perjuangannya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya “. (Yudi Latif, 2011)

Kondisi sekarang ini secara sistemik dan gradual muncul beragam paradoks antara subsistem dan subsistem yang lain dalam kehidupan bangsa sehingga Pancasila terperangkap dalam kesunyian. Sementara para elit politik sibuk berebut kekuasaan tanpa mengindahkan etika dan moral yang bersumber dari nilai-nilai ideologi bangsa (Pancasila). Setelah kekuasaan dalam gegamannya mereka ramai-ramai menjarah aset negara atau melakukan tindak pidana korupsi (17 Gubernur, 140 Bupati dan walikota tersangkut pidana korupsi), akibatnya timbul kegaduhan politik, konflik vertikal, konflik horizontal dan kegalauan masyarakat. Pada hal seharusnya para elit politik itu menjadi tauladan dalam mewujudkan good governanc, dan memikirkan kemajuan bangsanya.

Keadaan ini kalau tidak segera dicarikan jalan keluarnya dapat membahayakan ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu momentum ini dapat kita jadikan untuk memantapkan kembali jati diri bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Tulisan ini mencoba memberikan

kontribusi solusi alternatif dalam upaya memantapkan keyakinan Pancasila sebagai idiologi negara melalui bela negara

METODE

Jenis Penelitian

Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti pilih dalam penelitian ini Peneliti menggunakan model teknik analisis data dari Milles dan Huberman yaitu teknik analisis interactive model. Menurut Milles dan Huberman menjelaskan Bahwa “aktivitas dalam analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menhan Ryamizad menegaskan, dengan bela negara dapat memperkuat pertahanan Indonesia yaitu untuk melawan terorisme, aksi radikal separatisme, bencana alam, wabah penyakit dan lain sebagainya, dengan strategi utama perang modern berbasis brainwash. Maka dari itu upaya cuci otak tersebut harus dilawan dengan penanaman mencintai dan rela berkorban untuk negara dengan bela negara.

Pentingnya Idiologi Bagi Negara

Idiologi dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Idiologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka

terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara idiologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Idiologi mencerminkan cara berpikir masyarakat bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Pospowardojo, 1991 (dalam Kaelan 2008). Dengan demikian idiologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Idiologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam idiologi terkandung suatu orientasi praksis.

Idiologi akan menjadi realistis mana kala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan idiologi, karena dengan demikian idiologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya, namun jika perlakuan terhadap idiologi diletakkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan maka maka dapat dipastikan idiologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu agar benar-benar idiologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka idiologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. (Kaelan, 2008).

Sebagai idiologi bangsa Pancasila semestinya diperlakukan terbuka diperbincangkan, diperdebatkan agar kian membesar masuk dalam berbagai wilayah dan sektor. Bahkan menjadi mainstream area diskursus apapun, sampai pada akhirnya mengilhami kebijakan atau kultur yang menguat di lingkungan masyarakat dan negara. Sebagai bagian dari konsensus politik, Pancasila diharapkan menjadi napas

dan jiwa interaksi berbangsa dan bermasyarakat.

Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita' dan 'logos' yang berarti ilmu. Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani 'eidos' yang artinya bentuk. Disamping itu ada kata 'idein' yang artinya melihat. Maka secara harafiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari 'idea' disamakan artinya dengan 'cita-cita'. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut : Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan), Bidang sosial, Bidang kebudayaan, Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan pada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. (Kaelan, 2008)

Dalam Microsoft Encarta Encyclopedia 2003 dalam (Deddy, 2007), ideologi didefinisikan sebagai sesuatu sistem kepercayaan yang memuat nilai-nilai dan ide-ide yang diorganisasi secara rapi sebagai basis filsafat, sains, program sosial ekonomi

politik yang menjadi pandangan hidup, aturan berpikir, merasa dan bertindak individu atau kelompok. Sementara itu Ian Adams (dalam Deddy, 2007) mengartikan ideologi sebagai doktrin yang membimbing tindakan politik, idealitas-idealitas yang mesti diyakini sebagai "iman" politik, tujuan yang wajib dipakai, alasan yang wajib diperjuangkan dan visi tentang masyarakat terbaik atau ideal yang harus diwujudkan.

Berkaitan dari pengertian dan konsep di atas, ideologi dapat diketahui secara struktural dan secara fungsional. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem kepercayaan dan pembenaran, seperti gagasan dan formula politik setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Adapun ideologi secara fungsional dimaknai sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi dalam arti fungsional digolongkan secara tipologi dengan dua tipe, yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Suatu Ideologi dapat digolongkan yang doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan rinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sementara ideologi yang bersifat pragmatis adalah kebalikan dari ideologi yang bersifat doktriner. (Deddy, 2007)

Negara menurut Pringgodigdo (dalam Deddy, 2007) adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa (national). Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi negara adalah rumusan cita-cita atau nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dan sebagai pedoman, pandangan, visi bagi suatu negara untuk mencapai cita-cita dan tujuannya yang

dijalankan oleh pemerintahan yang yang berdaulat.

Idiologi Pancasila

Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau azas. Pancasila berarti lima dasar atau lima azas. Diatas lima dasar inilah berdirinya Negara Republik Indonesia. Pancasila dipilih menjadi dasar negara karena Pancasila sesuai dengan alam kejiwaan bangsa kita sendiri, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno “ sudah jelas kalau kita mau mencari dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia” Ernest Renan mengatakan bahwa “setiap bangsa mempunyai suatu jiwa “ (une nation, est une ame). Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa yang disebut kepribadian bangsa Indonesia. Tegasnya Pancasila adalah manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia. Disamping itu Pancasila merupakan tuntunan yang dinamis, seperti Bung Karno menyebutkan sebagai “leidster” bintang pimpinan, kearah mana bangsa dan negara Indonesia harus digerakkan. (Rozali, 1983)

Sebagai idiologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana idiologi-idiologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian Pancasila sebagai idiologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil idiologi dari bangsa lain. Jadi Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila pada hakekatnya untuk seluruh lapisan dan unsur-unsur bangsa secara konprehensif. Oleh karena itu

ciri khas Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Idiologi Pancasila mendasarkan pada hakekat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam idiologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakekat nilai-nilai ketuhanan bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

Pancasila sebagai dasar filsafati negara Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, sila-sila dalam Pancasila atau kelima sila yang ada di dalamnya merupakan suatu sistem yaitu merupakan satu kesatuan yang bulat, hierarkis dan sistematis, maka kelima sila bukan terpisah pisah melainkan memiliki makna yang utuh yang merupakan sistim nilai (Kaelan,2000). Hal ini sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwa dasar negara terkandung didalamnya seperangkat nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai berfungsi pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Pancasila berisi lima nilai yang merupakan nilai dasar fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila merupakan rumusan ideal, bersifat das sollen dan cita-cita yang harus

diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Idiologi Negara Dalam Bahaya

Idiologi negara Pancasila kini mendapat tantangan yang luar biasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menurut sejarawan UI, Anhar G, (Kompas 2011), semua rezim yang memerintah Indonesia sejak merdeka hingga saat ini dinilai gagal dalam menjalankan Pancasila sebagai idiologi negara dengan benar. Cita-cita mendirikan negara melalui sistim politik dan ekonomi yang dapat mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum mampu diwujudkan pemerintahan manapun. Lima tahun pertama periode kepemimpinannya, Soekarno dihadapkan situasi sulit mempertahankan kemerdekaan karena belanda ingin berkuasa kembali. Dalam periode demokrasi liberal tahun 1950-1958 pemerintahan tidak berjalan stabil. Kabinet jatuh bangun sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial pun jauh dari harapan. Pemerintahan orde baru, yang mengklaim menjalankan pembangunan sesuai dengan, pada kenyataannya menjalankan ekonomi liberalis.

Slamet Sutrisno, Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM, (2013), mensinyalir bahwa Pancasila sebagai idiologi menghadapi tiga jenis tantangan, pertama internasional (globalisasi) kedua nasional (kultur kekerasan dan konflik) dan ketiga lokal (sektarianisme / primordial dan pemaksaan simbol historis tertentu).

Dalam kenyataan empiris, Nilai Pancasila yang luhur itu pun terkoyak di sekujur sila pertama sampai kelima : (Kompas 2 /2/2012)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah
 - b. Konflik GKI Taman Yasmin Bogor
 - c. Penutupan sejumlah gereja dan pelarangan ibadah di beberapa wilayah

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - a. Kekerasan oleh aparat seperti di Bima dan Mesuji (2011)
 - b. Setara Institute merilis indeks penegakkan HAM 2011 di Indonesia sangat rendah
 - c. Komnas HAM menilai pengungkapan pelaku kasus pelanggaran berat HAM masih berjalan di tempat (Kasus Tanjung Priuk, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan Timor Timur)
3. Persatuan Indonesia
 - a. Ancaman separatisme (Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan,
 - b. Konflik perbatasan (lepasnya pulau sipadan dan ligitan dari Indonesia)
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 - a. Indeks demokrasi Indonesia 2011 dinilai masih rendah menurut Demos dan Puskapol UI, yakni berada dikisaran angka 4,99 dari skala 0-10
 - b. Indeks kebebasan pers di Indonesia merosot. Tahun 2011 di peringkat ke-146 dari 179 negara dibandingkan tahun 2008 di posisi ke-111 dari 173 negara
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - a. Indeks korupsi Indonesia di peringkat ke 100 dari 183 negara dengan indeks 3,0 (2011)
 - b. Pemekaran wilayah dinilai belum mewujudkan kesejahteraan daerah. Pemerintah melakukan moratorium pemekaran (2009)
 - c. Ketimpangan pembangunan masih terjadi. BPS mencatat struktur perekonomian Indonesia didominasi provinsi di Jawa (57,5% dan Sumatra (23,6%).

Oleh karena itu begitu cepatnya perkembangan masyarakat di era global yang ditandai dengan kemajuan yang pesat

di bidang teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap eksistensi ideologi negara Pancasila. Beberapa peristiwa akhir-akhir ini seperti teror bom Sarinah Jakarta, yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang berafiliasi dengan negara yang menganut ideologi radikal (ISIS) merupakan suatu indikasi adanya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menggoyahkan ideologi negara Pancasila. Pada tataran lokal pun sering terjadi konflik dan kekerasan yang dilakukan selompok orang yang berusaha menimbulkan kekacauan. Ini terjadi ketika Aliansi Kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB) sedang memperingati hari kelahiran Pancasila di Monas 1 Juni 2008, dikacaukan oleh kelompok atau ormas.(FPI). Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, etnik dan lainnya merupakan fakta dan berpotensi terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu Indonesia harus terus menerus belajar untuk mengelola perbedaan agar terwujud ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui bela negara untuk memperkuat pertahanan Indonesia dari rongrongan baik yang dari dalam maupun luar negeri.

Memperkokoh Ideologi Pancasila dengan Bela Negara

Bela negara sebenarnya merupakan amanah konstitusi, namun dalam implementasinya diperlukan rumusan-rumusan baru yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Konsep bela negara telah menjadi pemikiran para ahli, menurut Richard Asley, bela negara adalah suatu pemikiran, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk membela bangsa dan negaranya. Kenny Erlington mengatakan bahwa bela negara adalah sikap warga negara yang berupaya mempertahankan negara ketika menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kepentingan negaranya. John Mc Kinsey menambahkan bahwa bela negara merupakan wujud nyata dari nasionalisme, patriotisme dan cinta

tanah air yang tercermin dalam setiap warga negara sehingga mutlak dimiliki oleh warga negara agar supaya negaranya menjadi kuat.(Agus Subagyo, 2014)

Dasar yuridis bela negara

Dasar hukum bela negara adalah pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “ bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”. Selain itu terdapat pula pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “ Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung” selanjutnya dalam UU NO 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6 B juga dinyatakan bahwa “ setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) ditegaskan lagi bahwa “ keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui : pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Secara lebih detail regulasi tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara yang ada di Indonesia, berikut :

1. Tap MPR No VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional.
2. UU No 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.
3. UU No 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara RI. Diubah oleh UU No 1 Tahun 1988.

4. Tap MPR NO VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No VII tahun 2000 tentang peranan TNI dan POLRI
6. Amandemen UUD 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Maraknya idiologi yang bernuansa agama yang muncul akhir-akhir ini yang disertai dengan aksi radikal (teror bom Thamrin), para tokoh agama atau ulama terpenggil dan tergerak untuk mengatasinya. Para ulama thariqah memandang bela negara menjadi semangat yang penting untuk digaungkan, sebab dunia Islam sekarang sedang dilanda krisis kebangsaan.

“nasionalisme masyarakat kini mulai meluntur, perlu adanya obat untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan bela negara” kata KH Al Habib Muhammad Luthfi, ketua Jammiyah Ahlith Thariqoh al Mutabaroh An-Nadliyah dalam acara silaturahmi nasional ulama thariqoh.

Dalam acara silaturahmi nasional tersebut menyampaikan sembilan (9) poin penting tentang bela negara.

1. Negara adalah tempat tinggal dimana agama diimplementasikan didalam kehidupan bernegara.
2. Negara merupakan kebutuhan primer dan tanpanya kemaslahatan tidak akan bisa terwujud
3. Bela negara adalah dimana setiap warga negara merasa memiliki dan cinta terhadap negara dan berusaha untuk mempertahankan dan memajukannya.
4. Bela negara merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa sebagaimana dijelaskan didalam al quran dan hadist nabi Muhamad SAW.
5. Bela negara dimulai dengan membentuk kesadaran diri yang bersifat kerohanian dan dibimbing oleh para ulama.
6. Bela negara tidak terbatas melindungi negara dari musuh atau sekedar tugas kemiliteran, melainkan usaha ketahanan

dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi pendidikan politik pertanian sosial budaya dan teknologi.

7. Bela negara menolak adanya terorisme, radikalisme, ekstremisme, yang mengatasnamakan agama.
8. Untuk mewujudkan bela negara dibutuhkan empat pilar yaitu ilmuwan, pemerintah yang kuat, ekonomi dan media.
9. Menjadikan Indonesia sebagai inisiator bela negara yang merupakan perwujudan dari islam rahmatan lil alamin

Konsensus bela negara yang dirumuskan dalam konferensi internasional ini disepakati oleh ulama thoriqoh dari Indonesia, Maroko Turki Sudan Yaman Amerika Yordania. (republika.co.id) 16-1-2016 Jadi bela negara harus dimaknai secara holistik, bela negara meliputi membela dan mempertahankan wilayah dan kebudayaan yang didalamnya meliputi idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Materi bela negara harus diajarkan sejak PAUD sampai Perguruan Tinggi. Dengan bela negara menjadikan warga negara memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme semakin berkarakter kebangsaan dan keIndonesiaannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Demikianlah paparan pentingnya memperkokoh idiologi Pancasila dalam negara kesatuan republik Indonesia dengan bela negara. Pelaksanaan bela negara yang dilakukan secara berkesinambungan dapat memupuk dan mempertebal keyakinan pada Pancasila sebagai arah dan pedoman dalam membangun bangsa dan negara. Bela negara kini memiliki relevansi yang tinggi di era global ini untuk memperkuat pertahanan bangsa Indonesia ditengah maraknya dan bermunculan paham atau idiologi-idiologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Bela negara dapat

memupuk karakter kebangsaan dan keIndonesiaan.

Saran

Bela negara kini memiliki relevansi yang tinggi di era global ini untuk memperkuat pertahanan bangsa Indonesia ditengah maraknya dan bermunculan paham atau ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Bela negara dapat memupuk karakter kebangsaan dan keIndonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subagyo, 2015, *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Graha Ilmu, Jakarta
- Deddy Ismatulah (2006), *Ilmu Negara Dalam Multi perspektif*, Pustaka Setia Bandung.
- Jazim Hamidi, 2010, *Civic Education, Antara Realitas Politik dan*

Implementasi Hukumnya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Janpatar Simamora, *Idiologi Negara Dalam Bahaya*.

Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.

Rozali Abdullah, 1983, *Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, Rajawali, Jakarta.

Slamet Sutrisno, 2013, *Makalah Pancasila Dan Pluralisme Transedental*, Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM.

Yudi Latif, Kompas, 29 Maret 2011, Kembali ke Pancasila.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.